



**Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 1, 2024**

## **PENGARUH PEMANFAATAN SIKD DAN PEMAHAMAN SAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI SKPD KOTA SUKABUMI**

**Agistiya Rimadania<sup>1\*</sup>, Sulaeman<sup>2</sup>**

<sup>1\*</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Indonesia

[agistiyaar@gmail.com](mailto:agistiyaar@gmail.com), [Sulaeman1342@ummi.ac.id](mailto:Sulaeman1342@ummi.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of utilization of Regional Financial Information Systems and understanding of Government Accounting Standards on the quality of financial reports in the Regional Work Unit of Sukabumi City. This research was conducted using quantitative methods. The population in this study were 20 Regional Work Unit of Sukabumi City. The sampling technique used nonprobability sampling technique with purposive sampling type, the samples were the head of the finance department, treasurer, and finance staff, with a total of 60 people. The results of the study using SPSS 27 for Windows software showed that partially the utilization of the Regional Financial Information System had a positive and significant effect on the quality of financial reports in the Sukabumi City Regional Work Unit with a t-test result of 3.305 and a significance of 0.002. Understanding Government Accounting Standards has a positive and significant effect on the quality of financial reports in the Sukabumi City Regional Work Unit with a t-test result of 2.300 and a significance of 0.025. The results of simultaneous testing showed that the utilization of Regional Financial Information Systems and understanding of Government Accounting Standards had an effect on the quality of financial reports in the Sukabumi City Regional Work Unit by 22.8% and was influenced by other factors not examined by researchers by 77.2%.*

**Keywords:** *Regional Financial Information System, Government Accounting Standards, Quality of Financial Statements*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 SKPD yang ada di Kota Sukabumi. Teknik pengambilan sampel dengan teknik nonprobability sampling dengan jenis sampling purposive, yang menjadi sampel adalah kepala sub bagian keuangan, bendahara, dan staf keuangan, dengan jumlah 60 orang. Hasil penelitian menggunakan software SPSS 27 for Windows menunjukkan bahwa secara parsial pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi dengan hasil uji t sebesar 3,305 dan signifikansi sebesar 0,002. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi dengan hasil uji t sebesar 2,300 dan signifikansi sebesar 0,025. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi sebesar 22,8% dan dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti sebesar 77,2%.

**Kata Kunci :** Sistem Informasi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah sebuah organisasi publik yang memiliki tanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah yang baik (Manimpurung et al., 2018). Masyarakat mengantisipasi tata kelola pemerintahan yang baik dalam kebijakan pemerintah mengingat perkembangan era reformasi yang pesat saat ini, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah merupakan contoh konkret pengelolaan keuangan pemerintah dengan terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karakteristik kualitatif ini menjadi penilaian yang harus dipenuhi untuk laporan keuangan menjadi berkualitas. Untuk mencapai tata kelola yang baik, pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sarana untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan daerah kepada publik adalah melalui penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah yaitu dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pemerintah daerah (Bintaurina et al., 2021). Dikarenakan laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD akan menjadi sumber dan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka setiap SKPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih ada beberapa SKPD yang terlambat menyerahkan atau bahkan belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga masih membutuhkan koreksi dari BPKPD, sehingga kurang bisa menghasilkan laporan keuangan yang kredibel. Keterlambatan dalam menyerahkan laporan keuangan akan menyebabkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tidak lagi relevan. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memahami SAP secara komprehensif dapat menjadi kendala dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan transaksi keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan suatu sistem pengelompokan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan (Inuzula & Bustami, 2021). Dengan tersedianya teknologi informasi yang terus berkembang diharapkan akan membantu dalam proses pembuatan dan penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu (Rahmawati et al., 2018). Selain itu, penggunaan teknologi dalam penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena memungkinkan semua pihak yang berkepentingan untuk mengakses data keuangan secara terbuka dan mudah (Wahyu et al., 2022).

Saat ini pemerintah daerah Kota Sukabumi telah memanfaatkan teknologi informasi dengan menerapkan sistem informasi keuangan daerah untuk membantu dalam proses penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Sistem yang digunakan adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai aplikasi pendamping. SKPD Kota

Sukabumi menggunakan dua aplikasi ini dikarenakan dalam penerapannya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) baru bisa berjalan sampai tahap perencanaan dan penganggaran. Sehingga, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dibutuhkan sebagai sistem pendamping untuk melaksanakan proses pencairan, pelaporan, dan proses penanggungjawaban. Dari lima laporan yang dihasilkan yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dalam pelaksanaannya sistem ini baru bisa menghasilkan dua laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, hal ini dikarenakan dalam menciptakan laporan, dibutuhkan koordinasi dari berbagai pihak.

Menurut (Welly & Seputra, 2019) penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan menjadi salah satu faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan diikuti dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Akan lebih mudah bagi pegawai bagian keuangan untuk membuat laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan ketika pegawai bagian keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu, pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu keuangan lainnya yang terkait. Pegawai SKPD harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, memiliki latar belakang pendidikan akuntansi serta mengikuti pelatihan. Keterbatasan pemahaman tentang proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi hambatan dalam terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

## **KAJIAN LITERATUR**

### ***Pengertian Laporan Keuangan***

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

### ***Tujuan Laporan Keuangan***

Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### ***Komponen Laporan Keuangan***

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas

- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

### ***Kualitas Laporan Keuangan***

Secara umum pelaporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif adalah pelaporan keuangan yang berkualitas atau mampu menghasilkan informasi keuangan yang memenuhi keinginan pengguna (Yadiati & Mubarak, 2017).

Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

### ***Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan***

Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah/pusat, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

### ***Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan***

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:

- a. Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;
- c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar;
- d. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

### ***Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah***

Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 2010) disebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

### ***Tujuan Sistem Informasi Keuangan Daerah***

Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 2010) disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah untuk:

- a. Membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
- b. Membantu menyediakan data dan informasi kepada Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- c. Membantu Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN, dan kebutuhan lain seperti statistik keuangan negara; dan

- d. Membantu Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pemerintahan, dan pembangunan di Daerah.

### ***Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah***

Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar manfaat dan memiliki makna prose, cara atau perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan dalam hal ini mengacu pada tindakan atau kegiatan menggunakan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari hal itu. Pemanfaatan juga mencakup penggunaan yang optimal dari sesuatu agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Dalam penjelasan (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 2010) disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dalam penyederhanaan akses antara unit kerja. Penyusunan laporan keuangan dan implementasi informasi keuangan akan menjadi lebih mudah dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan akurasi dan ketepatan yang dimiliki oleh teknologi ini, serta kemampuannya dalam menyimpan data dalam skala yang lebih besar. Sebagai hasilnya, pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Dikutip dari (Zamzami et al., 2018) pada dasarnya, pemakaian teknologi dan teknologi informasi adalah untuk memudahkan, mempercepat (*drive up*), dan efisiensi (*Low cost*) pekerjaan yang dilakukan secara manual oleh tenaga manusia, serta mengurangi kesalahan manusiawi (*human error*) yang muncul. Namun pemanfaatan dan pengembangan teknologi atas sistem kerja yang berjalan dalam suatu entitas harus tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak diraih. Jika tidak, akan sangat mungkin terjadi justru sebaliknya, yaitu pemborosan (*high cost*) atau bahkan kegagalan dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Wilkinson, et al (2000) dalam (Aulina Nur, 2019) penggunaan teknologi akan berdampak pada peningkatan dalam hal:

- a. Tingkat Kecepatan
- b. Tingkat Keamanan
- c. Tingkat Keefisienan Biaya
- d. Tingkat Kualitas Hasil

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di 20 SKPD yang ada di Kota Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 SKPD yang ada di Kota Sukabumi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik nonprobability sampling dengan jenis sampling purposive, sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kasubag keuangan, bendahara, dan staf keuangan, dengan jumlah 60 orang.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah pengujian validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dengan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. Uji ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 27 for Windows.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***Hasil Uji Validitas***

Diketahui nilai r tabel untuk pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada 60 responden adalah 0,254. Berdasarkan hasil uji validitas, didapat hasil r hitung  $> 0,254$  dengan demikian syarat validitas dari alat ukur sudah terpenuhi.

Hasil analisis menunjukkan hasil untuk variabel X1 yaitu pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk pernyataan item 1 sebesar 0,626, pernyataan item 2 sebesar 0,586, pernyataan item 3 sebesar 0,628, pernyataan item 4 sebesar 0,682, pernyataan item 5 sebesar 0,685, pernyataan item 6 sebesar 0,682.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan variabel X1 yaitu pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dari pernyataan item 1-6 valid.

Hasil analisis menunjukkan hasil untuk variabel X2 yaitu pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan untuk pernyataan item 1 sebesar 0,606, pernyataan item 2 sebesar 0,553, pernyataan item 3 sebesar 0,595, pernyataan item 4 sebesar 0,753, pernyataan item 5 sebesar 0,629. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan variabel X2 yaitu pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dari pernyataan item 1-5 valid.

Hasil analisis menunjukkan hasil untuk variabel Y yaitu kualitas laporan keuangan untuk pernyataan item 1 sebesar 0,547, pernyataan item 2 sebesar 0,660, pernyataan item 3 sebesar 0,464, pernyataan item 4 sebesar 0,652, pernyataan item 5 sebesar 0,591, pernyataan item 6 sebesar 0,546, pernyataan item 7 sebesar 0,615, pernyataan item 8 sebesar 0,676, pernyataan item 9 sebesar 0,521. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan variabel Y yaitu kualitas laporan keuangan, dari pernyataan item 1-9 valid.

**Hasil Uji Reliabilitas**

Nilai reliabilitas untuk variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X1) sebesar 0,724 dengan 6 item pernyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai  $r1 \geq 0,6$  artinya instrumen pada variabel X1 andal.

Nilai reliabilitas untuk variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X2) sebesar 0,614 dengan 5 item pernyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai  $r1 \geq 0,6$  artinya instrumen pada variabel X2 andal.

Nilai reliabilitas untuk variabel kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,761 dengan 9 item pernyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai  $r1 \geq 0,6$  artinya instrumen pada variabel Y andal.

**Hasil Uji Normalitas**

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual	
N		60	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	2,32231452	
Most Extreme Differences	Absolute	,053	
	Positive	,053	
	Negative	-,052	
Test Statistic		,053	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	,956	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,950
		Upper Bound	,961

Sumber: data diolah menggunakan SPSS 27, 2023

Berdasarkan hasil pengujian one sampel kolmoorov-smirnov test diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Artinya data sampel yang diambil terdistribusi normal.

**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

**Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18,766	5,338		3,516	,001
TX.1	,521	,158	,385	3,305	,002
TX.2	,355	,154	,268	2,300	,025

a. Dependent Variable: TY

Sumber: data diolah menggunakan SPSS 27, 2023

Kualitas laporan keuangan (Y) = 18,766 + 0,521 X1 + 0,355 X2

1. Konstanta sebesar 18,766 menunjukkan bahwa jika nilai pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan adalah nol, maka kualitas laporan keuangan akan memiliki nilai sebesar 18,766.
2. Koefisien Regresi X1 sebesar 0,521 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,521. Sebaliknya, setiap penurunan satu satuan pada pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, akan menurunkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,521, dengan asumsi bahwa nilai X2 tetap.
3. Koefisien Regresi X2 sebesar 0,355 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,355. Sebaliknya, setiap penurunan satu satuan pada pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, akan menurunkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,355, dengan asumsi bahwa nilai X1 tetap. Tanda positif (+) menunjukkan hubungan searah antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), sedangkan tanda negative (-) menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik antara variabel independen dengan variabel dependen.

**Hasil Uji Hipotesis**

**Hasil Uji T**

**Tabel 8. Hasil Uji T Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18,766	5,338		3,516	,001
TX.1	,521	,158	,385	3,305	,002
TX.2	,355	,154	,268	2,300	,025

a. Dependent Variable: TY

Sumber: data diolah menggunakan SPSS 27, 2023

1. Pengujian variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X1)  
 Dari hasil output dapat diketahui bahwa t hitung berjumlah 3,305 sementara t tabel ( $Dk = 60 - 2 - 1 = 1,672$ ) dimana  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,002 dimana  $\text{Sig} < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan daerah, artinya  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima yang menunjukkan terdapat pengaruh secara parsial.
2. Pengujian variabel Pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X2)  
 Dari hasil output dapat diketahui bahwa t hitung berjumlah 2,300 sementara t tabel ( $Dk = 60 - 2 - 1 = 1,672$ ) dimana  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,025 dimana  $\text{Sig} < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara

variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan daerah, artinya  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima yang menunjukkan terdapat pengaruh secara parsial.

### Hasil Uji F

**Tabel 9. Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	93,988	2	46,994	8,418	,001 <sup>b</sup>
	Residual	318,196	57	5,582		
	Total	412,183	59			

a. Dependent Variable: TY

b. Predictors: (Constant), TX.2, TX.1

Sumber: data diolah menggunakan SPSS 27, 2023

Dari hasil output diatas diketahui nilai F hitung sebesar 8,418 sedangkan hasil F tabel ( $D_k = 60 - 2 - 1 = 57$ ) diperoleh sebesar 3,16 dimana F hitung lebih besar daripada F tabel, sementara nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,001 dimana  $Sig < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen yaitu pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (X1) dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan (X2) terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah (Y), yang artinya  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima dimana menunjukkan adanya pengaruh secara simultan.

## PEMBAHASAN

### *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X1) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)*

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh antara variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dimana hasil t hitung diperoleh sebesar 3,305 dan t tabel sebesar 1,672 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 ( $Sig < 0,05$ ). Artinya bahwa  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima yang menunjukkan terdapat pengaruh antara Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan secara parsial.

Salah satu faktor pendukung laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah, terlihat dari hasil analisis yang diukur menggunakan kuesioner dengan jumlah responden 60 orang yang terdiri dari kasubag keuangan, bendahara, dan staf keuangan dari 20 SKPD di Kota Sukabumi, dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah akan berdampak pada peningkatan dalam hal tingkat kecepatan, tingkat keamanan, tingkat keefisienan biaya, dan tingkat kualitas hasil dari laporan keuangan SKPD di Kota Sukabumi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Inuzula & Bustami, 2021) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Sulastri et al., 2020) yang menyatakan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)*

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat pengaruh antara variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dimana hasil t hitung diperoleh sebesar 2,300 dan t tabel sebesar 1,672 dengan signifikansi sebesar 0,025 ( $Sig < 0,05$ ). Artinya bahwa  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima yang menunjukkan terdapat pengaruh antara Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan secara parsial.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemahaman pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi. Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010) disebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di

Indonesia. Sehingga untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, ialah setiap pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan dengan baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Inuzula & Bustami, 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Islamay & Trisnaningsih, 2022) yang menyatakan bahwa pemahaman Standar Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### ***Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (X1) dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)***

Berdasarkan perhitungan uji F yang telah dilakukan, menyatakan bahwa F hitung yang diperoleh sebesar 8,418 sedangkan untuk F tabel diperoleh sebesar 3,16. Sesuai kriteria pengujian bahwa jika F hitung > F tabel maka  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa nilai  $K_d$  sebesar 0,228 atau 22,8%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi sebesar 22,8% dan sisanya 77,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah, proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keuangan dapat diotomatisasi, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Sistem Informasi Keuangan Daerah memastikan integritas data keuangan dengan menghindari kesalahan penginputan manual dan memastikan konsistensi data yang digunakan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan. Sistem Informasi Keuangan Daerah memungkinkan proses pengolahan data keuangan menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, laporan keuangan dapat disusun lebih tepat waktu, dan meminimalkan risiko keterlambatan atau ketidaktepatan informasi.

Secara keseluruhan, pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan secara bersama-sama dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah memberikan efisiensi operasional dan integritas data, sementara pemahaman standar akuntansi pemerintahan memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sehingga kedua variabel ini dapat membuat laporan keuangan yang dihasilkan lebih baik dalam hal akurasi, relevansi, transparansi, dan keandalan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi dengan hasil uji t sebesar 3,305 dan signifikansi sebesar 0,002 yang berarti hipotesis  $H_{01}$  ditolak dan hipotesis  $H_{a1}$  diterima.

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi dengan hasil uji t sebesar 2,300 dan signifikansi sebesar 0,025 yang berarti hipotesis  $H_{02}$  ditolak dan hipotesis  $H_{a2}$  diterima.

Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi dengan hasil uji F sebesar 8,418 dan signifikansi sebesar 0,001 yang berarti hipotesis  $H_{03}$  ditolak dan hipotesis  $H_{a3}$  diterima. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi sebesar 22,8% terlihat dari hasil uji koefisien determinasi sebesar 22,8% dan 77,2% faktor lain yang menjadi pengaruh kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Sukabumi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**DAFTAR LITERATUR**

- Aulina Nur, R. (2019). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai*.
- Bintaurina, S., Sudarmanto, E., & ... (2021). ... Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 .... *Jurnal Online Mahasiswa* ....  
<https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1607>
- Inuzula, L., & Bustami, K. (2021). ... Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.  
<http://e-jurnal.pnl.ac.id/ekonis/article/view/2187>
- Islamay, A. A., & Trisnarningsih, S. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Internal Audit .... *COSTING: Journal of Economic* ....  
<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/3925>
- Manimpurung, R., Kalangi, L., & ... (2018). ... dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado. *Going Concern: Jurnal* .... <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19142>
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010).
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2), 8–17.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sulastri, R., Nugroho, G. W., & Nurodin, I. (2020). ... Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Dan Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Universitas*.  
<http://www.jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/526>
- Wahyu, I., Defitri, S. Y., & Das, N. A. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah:(Studi Empiris Pada Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Ekonomi Dan* ....  
<https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/optimal/article/view/506>
- Welly, W., & Seputra, R. (2019). Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *Akuntanika*.  
[journal.poltekanika.ac.id](http://journal.poltekanika.ac.id/index.php/akt/article/download/119/107)  
<http://journal.poltekanika.ac.id/index.php/akt/article/download/119/107>
- Yadiati, W., & Mubarak, A. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan Kajian Teoritis dan Empiris*. Penerbit KENCANA.
- Zamzami, F., Duta Nusa, N., & Arifin Faiz, I. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Gadjah Mada University Press.